

I GUSTI NGURAH MADE AGUNG

1. Identitas Pribadi :

I Gusti Ngurah Made Agung lahir pada 5 April 1876 di Puri Agung Denpasar Bali, dan dinobatkan sebagai Raja Badung VII pada tahun 1902. Ia gugur dalam pertempuran melawan pasukan penjajah Belanda pada 20 September 1906. Karena gugur di medan perang, ia diberi gelar kehormatan Ida Betara Tjokorda Mantuk Ring Rana (Raja yang gugur di medan perang).

2. Riwayat Perjuangan :

- a. Sepanjang hidupnya Raja Badung VII menentang penjajahan Belanda. Melalui karya-karya sastranya ia membangkitkan semangat perjuangan. Di antara karya sastranya adalah : *Geguritan Dharma Sasana, Gegurutan Niti Raja Sasana, Geguritan Nengah Jimbaran, Kidung Loda, Geguritan Purwasensara, Kakawin Atlas, Geguritan Hredaya Sastra.*
- b. Setelah diangkat menjadi Raja Badung VII pada tahun 1902, ia langsung menolak untuk melanjutkan isi Perjanjian Kuta antara raja-raja di Bali dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang ditandatangani pendahulunya pada 13 Juli 1849. Penolakannya didasarkan pada pandangannya bahwa isi Perjanjian Kuta merugikan kemerdekaan kerajaan-kerajaan di Bali, termasuk Kerajaan Badung karena berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah kolonial mempunyai dasar hukum untuk ikut campur dalam masalah internal Kerajaan Badung dan kerajaan-kerajaan lain di Bali.
- c. Raja Badung VII adalah seorang budayawan yang menjaga kebudayaan Bali. Oleh karena itu ia menentang larangan Pemerintah Hindia Belanda terhadap pelaksanaan upacara *mesatye* (pengorbanan bunuh diri permaisuri) dalam upacara pembakaran jenazah Raja Tabanan pada 25 Oktober 1903. Penentangan ini mengakibatkan hubungan antara Kerajaan Badung dan Belanda menjadi semakin memburuk.
- d. Belanda memanfaatkan terdamparnya Kapal Dagang Sri Kumala yang berbendera Belanda di Pantai Sanur pada 27 Mei 1904 untuk menghancurkan Kerajaan Badung dengan tuduhan melakukan perampokan terhadap kapal dagang tersebut. Raja Badung VII menolak tuduhan ini. Ia juga menolak untuk membayar ganti rugi yang dituntut Belanda. Penolakan tersebut berakibat pada dilakukannya blokade ekonomi oleh Belanda terhadap Kerajaan Badung dari bulan Nopember 1904 hingga Oktober 1906.
- e. Pada bulan September 1906 Pemerintah Hindia Belanda membentuk pasukan besar di bawah pimpinan Jenderal Mayor M.B.Rost van Tonningen karena

blokade ekonomi tidak berhasil menghancurkan Kerajaan Badung. Pembentukan pasukan ini tidak membuat Raja Badung VII menyerah. Sebaliknya, ia memilih untuk berperang melawan pasukan Belanda tersebut hingga gugur di medan pertempuran pada tanggal 20 September 1906. Pertempuran ini lebih dikenal dengan nama Puputan Badung.

3. Kesimpulan :

- a. Perang yang dilakukan I Gusti Ngurah Made Agung dalam Puputan Badung merupakan sebuah perjuangan mempertahankan kedaulatan Kerajaan Badung dan Tabanan dari penjajahan Belanda. Perjuangannya memberikan inspirasi kepada rakyat Bali untuk melakukan perang puputan selanjutnya, seperti yang dilakukan oleh pasukan I Gusti Ngurah Rai dalam Puputan Margarana melawan pasukan Belanda pada bulan November 1946.
- b. I Gusti Ngurah Made Agung sepanjang hidupnya konsisten dalam perjuangan menentang penjajahan Belanda. Penentangan dilakukan secara fisik maupun nonfisik melalui karya-karya sastranya yang membangkitkan semangat perjuangan

KOMJEN POL. DR. H. MOEHAMMAD JASIN

I. IDENTITAS PRIBADI

Komisaris Jenderal Polisi Dr. H. Moehammad Jasin lahir pada tanggal 9 Juni 1920 di Bau-Bau, Buton, Sulawesi. Ayahnya, Haji Mekah, berasal dari Bone, sedangkan ibunya, Siti Rugayah, berasal dari Maros. Ia merupakan anak laki-laki satu-satunya dari pasangan suami-istri ini. Moehammad Jasin meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2012 di Rumah Sakit Polri Soekamto. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Atas jasanya terhadap bangsa dan negara, pemerintah menghadihinya beberapa tanda penghargaan. Salah satu di antaranya ialah Bintang Mahaputra Utama pada tahun 1995.

II. RIWAYAT PERJUANGAN

1. Pendidikan umum diikuti Jasin di *Volkschool* di Bau-Bau, *Hollands Inlandsche School (HIS)* dan *Schakel School* di Makassar, dan terakhir di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)*, juga di Makassar. Setelah tamat dari MULO pada tahun 1941, Jasin mengikuti pendidikan kepolisian di Sekolah Polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Selesai mengikuti pendidikan ini, dengan pangkat Hoofd Agent, ia bertugas di kantor Polisi Seksi 111 di Bubutan, Surabaya. Pada masa awal pendudukan Jepang, Jasin kembali ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan polisi ala Jepang yang lebih bercirikan pendidikan militer. Sesudah itu, ia ditempatkan di Gresik dan bertugas sebagai instruktur di Sekolah Polisi di Surabaya, tempat mendidik calon-calon anggota *Tokubetsu Keisatsu Tai* (Polisi Istimewa). Di sekolah ini, bukan hanya ilmu kepolisian yang diajarkan, tetapi juga kemiliteran. Di samping itu, Jasin juga memberikan pelatihan terhadap anggota *Seinendan*.
2. Setelah Indonesia merdeka, Jasin melibatkan dirinya secara aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tindakan pertamanya yang cukup monumental ialah memproklamasikan Polisi Istimewa menjadi Polisi Indonesia. Proklamasi itu diucapkan pada tanggal 21 Agustus 1945, delapan hari sebelum Pemerintah RI mengangkat R.S. Sukanto sebagai Kepala Djawatan Kepolisian Negara. Dengan proklamasi itu berarti Jasin melepaskan keterikatan Polisi Istimewa dengan Jepang dan mengubah status polisi ini dari polisi kolonial menjadi polisi negara merdeka. Proklamasi itu sekaligus juga merupakan antisipasi terhadap kemungkinan Jepang melucuti senjata Polisi Istimewa seperti yang mereka lakukan terhadap tentara Pembela Tanah Air (Peta) dan *Heiho*.
3. Selama bulan-bulan pertama sesudah Proklamasi Kemerdekaan, dapat dikatakan bahwa Surabaya merupakan kota "terpanas" di Indonesia, baik disebabkan oleh perebutan senjata dari pasukan Jepang maupun pertempuran melawan pasukan Sekutu. Dalam kaitan dengan perebutan senjata, dapat dicatat dua peran yang dimainkan Jasin. Pertama, dalam perebutan senjata di Don Bosco, kedua di Markas *Kempeitai*. Gedung Bosco dijadikan Jepang sebagai gudang senjata (arsenal) terbesar di Surabaya. Usaha tokoh-tokoh pejuang Surabaya, termasuk Bung Tomo, meminta agar senjata di arsenal tersebut diserahkan, tidak berhasil. Pihak Jepang bersedia menyerahkan senjata hanya kepada

polisi. Di markas *Kempeitai*, para pejuang Surabaya terlibat dalam baku tembak dengan pasukan Jepang. Dalam suasana seperti itu, dengan menerobos kawat berduri, Jasin memasuki markas dan menemui komandan *Kempeitai* untuk mengadakan perundingan. Sebagai hasil dari perundingan itu, pihak *Kempeitai* bersedia menyerahkan senjata. Jasin pun berjanji akan menjamin keselamatan anggota *Kempeitai* selama mereka berada di Surabaya.

4. Beberapa hari setelah Pertempuran Surabaya meletus, Jasin mengumumkan lewat radio bahwa pasukan Polisi Istimewa yang dipimpinya sudah dimiliterisasi dan karena itu diharuskan ikut dalam pertempuran. Dengan demikian, polisi tidak hanya berfungsi sebagai alat keamanan, tetapi sekaligus juga sebagai alat pertahanan. Selama pertempuran Surabaya berlangsung, Jasin memimpin pasukannya dalam pertempuran di beberapa tempat. Ia meninggalkan Surabaya dan memindahkan markasnya ke Sidoarjo menjelang akhir November 1945, setelah hampir seluruh kota ini dikuasai Inggris. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua, Jasin bergerilya di sekitar Gunung Wilis. Ia juga bertugas sebagai Komandan Militer Sektor Timur Madiun.
5. Nama Mohammad Jasin tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan *Mobiele Brigade* (Mobbrig) yang kemudian berganti nama menjadi Brigade Mobil (Brimob). Pasukan khusus yang dapat berfungsi sebagai pasukan tempur ini dibentuk pada bulan November 1946 dalam Konferensi Djawatan Kepolisian Negara di Purwokerto. Jasin yang hadir dalam konferensi itu diangkat menjadi Komandan *Mobiele Brigade Besar* (MBB) Jawa Timur, sekaligus Koordinator Mobrig di semua keresidenan di Jawa Timur. Sebagai Komandan MBB Jawa Timur, pada bulan September 1948 ia memimpin empat kompi Mobrig untuk, bersama dengan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun. Setelah Madiun dikuasai kembali oleh pasukan pemerintah, Jasin dan pasukannya melancarkan operasi pembersihan terhadap sisa-sisa PKI di Blitar Selatan. Dalam periode tahun 1950-an, ia juga terlibat dalam menumpas berbagai pemberontakan dalam negeri, antara lain pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).
6. Pada waktu di Sumatera terjadi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Pemerintah Amerika Serikat bermaksud menempatkan pasukan marinir di Riau dengan alasan menjaga instalasi minyak milik perusahaan Amerika dan keamanan warga negara Amerika. Jasin beranggapan bahwa penempatan pasukan itu sebagai bantuan terselubung Amerika untuk PRRI. Dengan persetujuan Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo, Jasin menemui Duta Besar Amerika Serikat, Howard P. Jones. Kepada duta besar ini dikatakannya bahwa tugas pengamanan dapat dilakukan oleh pasukan Mobrig, sehingga Amerika Serikat tidak perlu mengirimkan pasukan marinir. Jaminan yang diberikan oleh Jasin dapat diterima oleh Jones dan Jasin pun menempatkan pasukan Mobrig di Riau seperti yang dijanjikannya.
7. Pada akhir tahun 1959, Moehammad Jasin diasingkan ke luar negeri, yakni ke Jerman. Latar belakangnya adalah, ia menentang pengangkatan Sukarno Joyonegoro sebagai

Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dengan alasan, Sukarno Joyonegoro "disenangi" oleh PKI. Sebagai protes, ia menolak untuk diangkat menjadi Wakil Menteri Angkatan Kepolisian mendampingi Sukarno Joyonegoro. Pada akhir Desember 1964, Presiden Sukarno meminta Jasin menemuinya di Paris. Dalam pertemuan itu, Presiden mengatakan bahwa Jasin akan diangkat menjadi Menteri /Panglima Angkatan Kepolisian. Oleh karena itu, pada awal Januari 1965 ia kembali ke Indonesia. Setelah bertugas beberapa waktu sebagai Sekretaris Komando Operasi Tertinggi (KOTI), ia dipanggil ke istana untuk dilantik sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian. Namun, atas desakan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) dr. Subandrio, pengangkatan itu dibatalkan.

8. Selain berkiprah di lingkungan kepolisian, Jasin juga pernah diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan kemudian MPR. Di luar lembaga kenegaraan, Jasin tercatat sebagai anggota Pimpinan Markas Besar Legiun Veteran RI dan Ketua Yayasan 10 November, serta beberapa organisasi lain. Dari tahun 1967 sampai 1970, ia bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Negara Tanzania.

III. KESIMPULAN

1. Komjenpol Purn Dr.H. Moehammad Jasin adalah orang yang berjasa dalam mendirikan Brimob, selain itu ketika terjadi pergolakan di Surabaya beliau menyelamatkan H.R. Mohamad dari penculikan serta berhasil menguasai Madiun ketika terjadi Pemberontakan PKI di Madiun.
2. Berperan dalam pertempuran 10 November Surabaya ketika menjabat sebagai Inspektur. Pada masa Revolusi berjasa besar dalam mempertahankan eksistensi Polisi di Indonesia dan melatih TRIP untuk dapat menggunakan Senjata

MAS ISMAN

I. Identitas Pribadi

Mas Isman lahir tanggal 1 Januari 1924, di Bondowoso, Jawa Timur. Ia memperoleh pendidikan di HIS Purwokerto, MULO Cirebon, SMP 2 Ketabang Surabaya, SMT Darmo Surabaya, Fakultas Hukum Surabaya, dan SESKOAD Bandung. Ia meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1982 dan dimakamkan di Jakarta.

II. Riwayat Perjuangan

1. Setelah pemerintah RI mengumumkan dibentuknya BKR tanggal 22 Agustus 1945, para pelajar Surabaya mengadakan rapat pada tanggal 30 Agustus 1945 di Jalan Darmo pimpinan Mas Isman untuk membentuk suatu organisasi pelajar bersenjata dengan dasar pemikiran bahwa para pelajar harus berjuang mengangkat senjata melawan penjajah. Maka pada tanggal 22 September 1945, pasukan pelajar dilantik oleh Sungkono di Sekolah Darmo 49 - Surabaya, Mas Isman diangkat menjadi komandan BKR Pelajar Surabaya yang diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1945. Perjuangannya dimulai tanggal 9 November 1945 dengan pernyataan "*Soempah Keboelatan Tekad*", mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.
2. Sebagai kesepakatan dari lahirnya TRIP tanggal 27 Januari 1946 di Mojokerto, diresmikan organisasi TRIP Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 1946, Mas Isman ditunjuk sebagai pemimpinnya. Selain berjuang mengangkat senjata, TRIP juga melakukan tugas-tugas kemasyarakatan memberikan penerangan dan penyuluhan mengenai kebersihan, kesehatan, pendidikan, dan kemerdekaan tanah air.
3. Pada masa pembangunan sesudah Indonesia merdeka, Mas Isman berkontribusi dengan mendirikan Koperasi Simpan-Pinjam Gotong Royong (Kosgoro) pada tanggal 10 Nopember 1957, menampung para eks anggota TRIP, dan Kosgoro berkembang menjadi koperasi tingkat nasional yang memberikan dampak luar biasa terhadap pembangunan bangsa.
4. Mas Isman menjadi anggota delegasi RI untuk berunding di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 dan menjadi diplomat, Kepala Perwakilan RI di Rangoon-Birma pada tahun 1959, Duta Besar di Bangkok - Thailand (1960-1964) dan Kairo - Mesir (1964-1967).
5. Selama menjabat sebagai anggota DPR/MPR RI pada tahun 1978-1982, ia tetap berkiprah dalam bidang organisasi kemasyarakatan, pendidikan (mendirikan SMK dan sekolah-sekolah Kosgoro) dan kemanusiaan.

III. KESIMPULAN

1. Mas Isman semasa hidupnya membentuk organisasi pelajar bersenjata dan menjadi komandan Badan Keamanan Rakyat Pelajar Surabaya berjuang untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.
2. Selain berjuang mengangkat senjata, sebagai komandan TRIP Jawa Timur, Mas Isman melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan dengan memberikan penerangan dan penyuluhan bagi kehidupan sosial.
3. Di masa pembangunan Indonesia Mas Isman membentuk Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong (Kosgoro) menjadi anggota delegasi RI untuk berunding di perserikatan bangsa-bangsa dan duta besar di beberapa negara serta menjabat sebagai anggota DPR/MPR RI pada tahun 1981-1982.

Ki Bagus Hadikusumo (1890-1954)

I. IDENTITAS PRIBADI

Ki Bagus Hadikusumo lahir pada tanggal 21 November 1890. Nama kecilnya Hidayat. Ia berasal dari keluarga priyayi santri di daerah Kauman, Yogyakarta. Ia meninggal dunia pada tanggal 7 September 1954. Jenazahnya dikuburkan di Makam Kuncen, Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia menghargai perjuangan dan jasa Ki Bagus Hadikusumo terhadap bangsa dan negara dengan menghadihinya tanda kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipradana dan Bintang Republik Indonesia Utama.

II. RIWAYAT PERJUANGAN

- 1.** Kultur Islami daerah ini mempengaruhi jiwanya. Ayahnya, Kyai Hasyim, adalah seorang abdi dalem Kraton Yogyakarta dan pernah memegang jabatan sebagai Lurah Bidang Keagamaan dengan gelar Lurah Kaji.
- 2.** Pendidikan formal yang diterima Ki Bagus hanya sampai tingkat Sekolah Dasar. Pendidikan agama, selain dari ayahnya, diperolehnya di dua pesantren tradisional, di Wonokromo dan Pekalongan. Di pesantren ini ia berkenalan dengan ilmu tasawuf, akan tetapi yang lebih penting dan berpengaruh ialah belajar agama langsung pada K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Melalui Ahmad Dahlan, Ki Bagus berkenalan dengan organisasi Islam itu.
- 3.** Perjalanan hidup, perjuangan dan pemikiran Ki Bagus Hadikusumo tidak dapat dilepaskan dari Muhammadiyah. Ia dibesarkan oleh, dan sekaligus juga membesarkan Muhammadiyah. Berbagai jabatan pernah dipegangnya. Diawali dengan jabatan sebagai Ketua Majelis Tabligh, kemudian Ketua Majelis Tarjih (lembaga fatwa), pada akhirnya ia menduduki posisi puncak sebagai Ketua Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah. Jabatan ini dipegangnya selama sebelas tahun, dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1953. Sebenarnya, dalam Kongres Muhammadiyah tahun 1953, Ki Bagus masih diminta untuk memimpin Muhammadiyah, namun ia menolak dengan alasan kesehatan.
- 4.** Perjuangan Ki Bagus Hadikusumo tidak terbatas hanya di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga dalam partai politik berbasis Islam. Pada tahun 1938 ia turut mendirikan Partai Islam Indonesia (PII), bahkan diangkat sebagai anggota Panitia Anggaran Dasar. Ia juga merupakan salah satu pendiri Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang didirikan di Yogyakarta pada bulan November 1943. Dalam partai ini ia memegang jabatan sebagai wakil ketua sejak didirikan sampai tahun 1950.
- 5.** Ki Bagus Hadikusumo dikenal sebagai seorang ulama yang sangat teguh berpegang pada akidah dan hukum Islam. Hal itu diperlihatkannya pada waktu menjadi anggota Komite Perbaikan Peradilan Agama yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dalam Komite ini, ia memperjuangkan agar pengadilan, dalam memutus perkara yang

berhubungan dengan masalah waris, menggunakan hukum Islam, bukan hukum adat. Walaupun komite menyetujuinya, namun ditolak oleh Pemerintah Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Ki Bagus mengeluarkan maklumat yang melarang rakyat Indonesia melakukan *seikeirei*, membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai penghormatan terhadap Kaisar Jepang. Akibatnya, ia terpaksa berurusan dengan pihak *Kempeitai*. Walaupun didesak agar mengeluarkan pernyataan bahwa *seikeirei* diperbolehkan, namun ia tetap menolak.

6. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1945, bersama dengan beberapa tokoh Islam lainnya, Ki Bagus memperjuangkan pula agar Islam dijadikan dasar negara yang akan didirikan. Ia khawatir, bila negara itu tidak didasarkan atas Islam, maka penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, akan bersikap pasif.
7. Untuk merumuskan dasar negara, di lingkungan BPUPKI dibentuk sebuah panitia yang disebut Panitia Kecil. Anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh nasionalis Islam dan tokoh-tokoh nasionalis netral agama (sekuler). Panitia ini menghasilkan rumusan yang akan dijadikan preambule undang-undang dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Di dalamnya tercantum kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Ternyata, rumusan tersebut bukanlah rumusan final.
8. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan, bersidang untuk mengesahkan undang-undang dasar. Sebelum sidang dimulai, Wakil Ketua PPKI, Mohammad Hatta, mengadakan pertemuan khusus dengan beberapa tokoh Islam. Berdasarkan informasi yang diterima dari seorang perwira Jepang, Hatta mengatakan bahwa penduduk Indonesia bagian timur berkeberatan, bahkan akan menolak untuk bergabung dalam Republik Indonesia, bila kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dicantumkan dalam preambule undang-undang dasar. Hatta meminta agar tujuh kata itu dihilangkan. Ki Bagus Hadikusumo yang juga hadir dalam pertemuan khusus itu, menghadapi masalah dilematis. Menyetujui saran Hatta, berarti ia tidak konsisten dengan pendiriannya. Bila menolak, ia akan dituding sebagai seorang yang tidak nasionalis. Akhirnya, setelah mengalami pergolakan batin, demi menjaga persatuan bangsa, ia menyetujui penghilangan tujuh kata tersebut. Dengan hilangnya tujuh kata itu, rumusan itu berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab...". Akan tetapi, bagi Ki Bagus Hadikusumo persoalannya belum selesai. Ia keberatan terhadap penggunaan kata "berdasarkan" dan mengusulkan agar kata itu dihilangkan. Alasannya, bila kata itu digunakan, akan timbul kesan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa lebih rendah daripada kemanusiaan. Sesuai dengan usul itu, maka rumusan akhir berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab...". Usul itu memperlihatkan bahwa Ki Bagus selalu menempatkan agama pada tempat tertinggi.

9. Pada masa Perang Kemerdekaan, dengan dukungan beberapa tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus memprakarsai pembentukan Angkatan Perang Sabil, yang diresmikan pada bulan Juli 1948. Pembentukan lasykar Islam ini merupakan reaksi terhadap diterimanya oleh pemerintah Persetujuan Renville yang dinilai oleh Muhammadiyah sangat merugikan posisi Republik Indonesia. Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir, Ki Bagus Hadikusumo masih menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mewakili Masyumi. Ia meninggal dunia pada tanggal 7 September 1954. Jenazahnya dikebumikan di Makam Kuncen, Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia menghargai perjuangan dan jasa Ki Bagus Hadikusumo terhadap bangsa dan negara dengan menghadihinya tanda kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipradana dan Bintang Republik Indonesia Utama.

III.KESIMPULAN

1. Ki Bagus Hadikusumo adalah orang yang memprakarsai penghilangan tujuh kata tersebut. Dengan hilangnya tujuh kata itu, rumusan itu berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab...". Usul itu memperlihatkan bahwa Ki Bagus selalu menempatkan agama pada tempat tertinggi.
2. Ki Bagus memprakarsai pembentukan Angkatan Perang Sabil, yang diresmikan pada bulan Juli 1948. Pembentukan lasykar Islam ini merupakan reaksi terhadap diterimanya oleh pemerintah Persetujuan Renville yang dinilai oleh Muhammadiyah sangat merugikan posisi Republik Indonesia. Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir

BERNARD WILHELM LAPIAN (1892-1977)

I. Identitas Pribadi

Bernard Wilhelm Lapian lahir tanggal 30 Juni 1892, di Minahasa Sulawesi Utara. Ia memperoleh pendidikan di ELS Amurang dan kursus-kursus setingkat MULO. Ia meninggal dunia pada 5 April 1977 dan dimakamkan di Jakarta.

II. Riwayat Perjuangan

1. Semasa bekerja di Batavia, BW Lapian menulis di surat kabar **Pangkal Kemadjoean**, yang memperlihatkan sikap nasionalis untuk membebaskan warga Indonesia dari kolonialisme. Ia kemudian mendirikan surat kabar **Fadjar Kemadjoean** (1924-1928) yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan sekembali ke kawangkoan pada tahun 1940 menerbitkan **Semangat Hidoep** yang isinya mengobarkan perlawanan terhadap propaganda kolonial yang mengajak warga Minahasa loyal kepada Belanda.
2. Pada tahun 1930-1934 menjadi anggota Dewan Minahasa dan memperjuangkan pembangunan fasilitas publik, infrastruktur, rumah sakit dan lainnya bagi kepentingan masyarakat. Ketika gereja nasionalis pertama yang mandiri, merdeka lepas dari campur tangan pemerintah kolonial didirikan, BW Lapian diangkat sebagai sekretaris Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) tahun 1930. Ia menjadi anggota Volksraad tahun 1937 dan bergabung dalam Fraksi Nasional berjuang mencapai kemerdekaan nasional dengan mengusahakan perubahan ketatanegaraan, menghapuskan perbedaan politik, ekonomi dan intelektual di kalangan masyarakat.
3. Semasa pendudukan Jepang pernah menjadi Gunco (Kepala Distrik), dan pada tahun 1945 menjadi Walikota Manado. Pada 14 Februari 1946 mengibarkan bendera merah putih dan peristiwa ini tersyiar melalui radio ke Australia dan BBC London, radio SanFrancisco hingga seluruh dunia. Pada tanggal 16 Februari 1946 ia terpilih sebagai Kepala Pemerintahan Sipil Sulawesi Utara, ia menyatakan bahwa Sulawesi Utara bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia dan bukan propinsi ke-12 negeri Belanda.
4. Karena menolak mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada NICA, BW Lapian dimasukkan ke dalam penjara di Teling Manado, dan tahun 1947 dipindahkan ke penjara Cipinang di Jakarta, tahun 1948 ke Sukamiskin, Bandung sampai dibebaskan tanggal 20 Desember 1949.
5. Semasa menjadi Acting Gubernur Sulawesi di Makassar, BW Lapian bertugas menyelesaikan masalah perlawanan kahar Muzakar secara damai. Ia juga membuka lahan di Dumoga Sulawesi Utara untuk area permukiman dan persawahan, membuka jalan raya menghubungkan Kotamobagu dengan daerah Molibago, membentuk DPRD di seluruh Propinsi Sulawesi dan menyelenggarakan pemilu pertama daerah Minahasa 14 Juni 1951.
6. Setelah pensiun, BW Lapian bertugas sebagai staf Perdana Menteri khususnya Biro Rekonstruksi nasional berkoordinasi dengan propinsi-propinsi berkenaan dengan

urusan transmigrasi, membantu KSAD Letjen A.H. Nasution dalam menangani masalah Permesta, dan mengaktifkan kembali surat kabar Semangat Hidup 20 Oktober 1960 guna mengimbangi siaran media pihak Permesta.

7. Sampai akhir hayatnya ia aktif dalam kegiatan gereja dan menduduki posisi sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja KGPM (Kerapatan gereja Protestan Minahasa).

III. Kesimpulan

1. BW Lopian semasa hidupnya memndirikan surat kabar Pangkal Kemadjoean, Fadjar Kemadjoean, dan Semangat Hidup yang isinya mengobarkan perlawanan terhadap propaganda kolonial Belanda.
2. Selain berjuang di bidang jurnalistik , ia juga aktif di bidang agama dan politik sebagai anggota Dewan Minahasa, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Anggota Volksraad yang tergabung dalam Fraksi Nasional untuk berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. Karena sikapnya yang anti kolonial menyebabkan ia dipenjara oleh pemerintah NICA dari tahun 1946 sampai dengan 20 Desember 1949.
3. Pada masa setelah kemerdekaan tahun 1950, ia aktif sebagai Acting Gubernur Sulawesi Utara dan membantu menyelesaikan secara damai masalah Kahar Muzakar, masalah Permesta, dan membangun propinsi Sulawesi Utara, serta menyelenggarakan pemilu I daerah Minahasa 14 Juni 1951. Setelah pensiun, ia aktif sebagai Staf Perdana Menteri khususnya Biro Rekonstruksi Nasional menangani masalah Permesta dan menerbitkan kembali surat kabar serta menjadi ketua Pimpinan Gereja KGPM (Kerapatan gereja Protestan Minahasa).